

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Republika

Tanggal : 10 Januari 2011

Subyek : Pengerukan Sungai

Hal : 22

### **Pengerukan 13 Sungai Terkendala Payung Hukum**

BALAI KOTA - Lagi-lagi, proyek yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus terkendala peraturan pemerintah (PP). Kali ini, rencana untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta atau proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JTJFMP) belum memperoleh payung hukum.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian kapan PP itu akan dikeluarkan. "Pemerintah pusat menjanjikan sebelum akhir tahun (2010), tapi sampai seka/ang belum. Mungkin maksudnya akhir tahun 2011," ujar Fauzi, Ahad (9/1). Padahal, pemprov sudah mempersiapkan tender proyek 13 sungai. Sebagian tendernya pun sudah dipegang oleh menteri pekerjaan umum (PU).

Seusai pertemuan dengan menteri PU pada Jumat (7/1), Fauzi menjelaskan, Pemprov DKI dan Kementerian PU sudah sepakat untuk segera memulai tender setelah PP-nya siap. "Dengan dibukanya tender, pengerjaannya dapat segera dilaksanakan karena kami sudah melakukan persiapan." kata Fauzi Bowo. Ia menegaskan PP itu diperlukan karena proyek JUFMP ini menggunakan dana pinjaman Bank Dunia. Tanpa PP itu, dana tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk pengentasan banjir di Jakarta. Sebab, Bank Dunia tidak bisa memberikan pinjamannya secara langsung ke Pemprov DKI tanpa melewati pemerintah pusat.

Pinjaman yang dibutuhkan Pemprov DKI sebesar 150 juta dolar AS yang dituangkan dalam PP 54/2005 dan PP 2/2006 mengenai tata cara pengadaan pinjaman dan atau pene-rimaan hibah dan penerusan pinjaman atau hibah luar negeri juga ikut menghambat, tetapi sudah direvisi. Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat akan menanggung 59 persen pinjaman dan Pemprov DKI 41 persen. Pasarnya, 13 sungai itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Sarwo Handayani, mengatakan bahwa posisi DKI saat ini hanya menunggu dan terus mendesak pemerintah pusat. Harapannya, PP tersebut tidak molor dan membuat segala program pengentasan banjir menjadi terlambat. "Kami maunya jangan sampai 2011 karena harus melalui beberapa tahap seperti tender konstruksi," ujar Yani. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyayangkan gerak lambat dari pemerintah. Seharusnya, memasuki 2011 masalah banjir sudah dapat ditanggulangi. Artinya, ketika ada hujan lebat atau banjir kiriman, DKI sudah siap dengan penanggulangannya.

Dia menilai, pemerintah kurang serius menangani masalah banjir. "Sampai saat ini pengerukan 13 sungai memang terkendala masalah dana yang belum cair dari pihak asing dan pemerintah sangat lambat menanganinya. Padahal, hal itu harus dituntaskan pada 2011," untkap Nirworo.

Proyek ini dirancang untuk mengatasi banjir dengan mengembalikan atau memperbesar daya tampung 13 sungai di Jakarta. 13 sungai utama di Jakarta itu sudah 30 tahun tidak dikeruk sehingga alirannya tidak lancar dan menyebabkan banjir tahunan. Proyek tersebut merupakan proyek yang dikerjakan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI. ed maghfiroh yenny